ADIJAYA
Jurnal Multidisiplin
https://e-journal.naureendigition.com/index.php/mj
Vol. 03, No. 06, 2026, Hal. 1035-1048
E-ISSN : 2964-7606

BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Canygia Cesar Putra Kedua[1], Frans Simangunsong[2]
Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
E-mail: *cesarputra09@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia terus bergulat dengan masalah perdagangan orang yang meluas, suatu jenis kejahatan internasional yang sangat terorganisir dan rumit. Selain melanggar hukum di tingkat nasional, kejahatan ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Perdagangan orang menjadi semakin umum dan rumit meskipun ada berbagai upaya untuk memeranginya, seperti UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Pasal 297 KUHP. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem penegakan hukum serta belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, serta menilai efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera sekaligus perlindungan bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dalam kejahatan perdagangan manusia di Indonesia didasarkan pada prinsip kesalahan (geen straf zonder schuld), di mana pelaku hanya dapat dihukum jika terbukti memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan unsur kesengajaan atau kelalaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang (UU PTPPO), semua bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengeksploitasi manusia, baik melalui kekerasan maupun penipuan, diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp. 600.000.000. Penelitian juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum mencakup dua bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban individual dan korporatif, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, asas legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya perlindungan hukum bagi korban, serta belum efektifnya integrasi kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret berupa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan reformasi kebijakan yang berpihak pada korban agar sistem pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perdagangan orang dapat diterapkan secara efektif, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kata kunci **pertanggungjawaban hukum, tindak pidana, perdagangan orang**

ABSTRACT *schuld), where the perpetrator can only be punished if proven to have the ability to be responsible and an element of intent or negligence. Based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes (UU PTPPO), all forms of actions aimed at human exploitation, whether through violence or fraud, are threatened with a maximum prison sentence of 15 years and a fine of up to Rp. 600,000,000. The study further emphasizes that legal accountability consists of two main forms: individual and corporate responsibility, both of which are grounded in the principles of justice, legality, and respect for human rights. However, the implementation in practice remains less effective due to weak inter-agency coordination, limited legal protection for victims, and the lack of effective cross-sector policy integration. Therefore, concrete measures are needed, including institutional strengthening, capacity building for law enforcement officials, and policy reform that prioritizes victim-centered justice. These steps are essential to ensure that the legal accountability system for perpetrators of human trafficking in Indonesia can be implemented effectively, fairly, and humanely.*

Keywords ***legal accountability, criminal act, human trafficking***

1. PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan transnasional yang sedang marak terjadi adalah perdagangan orang, yang dikenal dengan human trafficking. Negara-negara berkembang dengan populasi besar dan rasio gender yang tidak seimbang cenderung lebih sering mengalami jenis kejahatan ini. Selain itu, kesenjangan ekonomi, yang ditandai dengan permintaan yang kuat akan tenaga kerja murah, yang sering diperoleh dari luar negeri, adalah akar penyebab kejahatan jenis ini. Hampir setiap negara yang menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia dapat memainkan salah satu dari tiga peran: negara tempat perdagangan dimulai, negara tempat para korban dibawa, atau negara tempat para korban ditahan sementara (Nugroho, 2018).

Prevalensi dan tingkat keparahan perdagangan manusia secara berkala terungkap. Sebagian besar dari dua juta korban perdagangan orang setiap tahunnya adalah anak-anak dan perempuan (Rachmad Syafaat, 2003). Statistik menunjukkan bahwa 2.425 korban diselamatkan dari perdagangan manusia, sementara 901 orang ditahan sebagai tersangka dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), yang telah menawarkan bantuan kepada korban perdagangan manusia, melaporkan bahwa perempuan составляет sekitar 90% dari korban, dengan anak-anak merupakan lebih dari 25% dari kelompok demografis yang paling rentan (Hidayat, 2024). Korban perdagangan orang domestik dan internasional paling sering berasal dari Indonesia. Perdagangan manusia memengaruhi lebih dari separuh pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)(Nugroho,2017).

Di Indonesia dan di tempat lain, perdagangan orang telah berlangsung sejak zaman prasejarah. Perbudakan dalam manifestasi kontemporernya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Perdagangan manusia selalu dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 297 KUHP, berdasarkan data historis negara mengenai hal tersebut. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, komitmen baru untuk menentang dan menaklukkan perdagangan orang sangat diperlukan karena merupakan kejahatan global yang terorganisir (Endrawati dan Sulistio, 2007).

Eksploitasi ilegal terhadap manusia untuk keuntungan finansial mencakup berbagai macam aktivitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ. Definisi sebelumnya tentang perdagangan orang adalah perolehan

manusia secara komersial untuk tujuan membeli dan menjualnya, baik korban mengetahuinya atau tidak. Semua orang sepakat bahwa perdagangan orang adalah kejahatan internasional besar karena melanggar hak-hak banyak orang. Sebagai kejahatan global, perdagangan orang sayangnya sangat umum terjadi (Utami dan Nasrudin, 2024).

Merupakan tindak pidana untuk merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan karena hutang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain. Kejahatan ini dapat terjadi di dalam atau antar negara, dan tujuannya adalah untuk mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi seseorang (Faradila *et all,* 2023). UU No21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menetapkan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia dalam upaya untuk mengekang aktivitas ilegal tersebut di Indonesia (Utami dan Nasrudin, 2024).

Penculikan, rayuan, perbudakan karena hutang, penipuan identitas, dan penipuan media sosial adalah beberapa strategi yang digunakan oleh TPPO saat ini. Sebagian besar kasus perdagangan manusia di Indonesia meliputi eksploitasi tenaga kerja atau seksualitas, kerja paksa, penjualan bayi baru lahir, atau perdagangan organ. Kejahatan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa, membutuhkan perhatian khusus. Namun kenyataannya, masih terdapat kekurangan data tentang TPPO di Indonesia. Belum lagi, pencegahan kini diabaikan dalam administrasi TPPO Indonesia, yang terutama berfokus pada membantu korban (Nugroho,2017).

Kejahatan human trafficking membutuhkan respon yang kuat terhadap pendampingan dan perlindungan korban, kebijakan migrasi yang kokoh, Sistem hukum pidana yang lebih kuat dan regulasi ketat di pasar kerja. Korban seringkali hanya menerima perlindungan material dalam beberapa kasus kejahatan, seperti hak untuk menuntut kompensasi. Harapannya penderitaan korban akan selesai setelah kompensasi diberikan. Karena itu, kerusakan yang dialami korban sangat kompleks, mencakup kerusakan fisik dan mental serta kerusakan material (Sari *et all,* 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia**,** serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang perdagangan orang dan langkah-langkah hukum yang diambil untuk mengakhirinya. Secara khusus, temuan ini dapat membantu mereka yang terlibat dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum di negara ini dan melindungi korban perdagangan orang.

Dalam hal memenuhi kewajiban konstitusional terkait hak asasi manusia, peran dan tanggung jawab negara lebih diutamakan. Sesuai dengan tanggung jawab hukumnya, Republik Indonesia harus membuat dan menegakkan undang-undang yang menjamin keselamatan warganya, membangun dan menjaga ketertiban umum, serta memastikan terwujudnya hak asasi manusia secara penuh, termasuk hak asasi perempuan. Hal ini termasuk mematuhi semua hukum dan peraturan domestik yang berlaku serta perjanjian hak asasi manusia internasional (Nugroho,2017).

Kewajiban negara dalam menegakkan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28I, Ayat 4 dan 5, UUD tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." HAM harus diimplementasikan dengan serius mengingat pentingnya hak-hak ini dan semakin banyaknya masalah sosial dengan nuansa yang berkaitan dengan HAM, yang mengancam kredibilitas pemerintah dalam menghadapi pengawasan dari dalam dan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas, urgensi penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia muncul dari kenyataan bahwa perdagangan orang masih menjadi kejahatan serius yang terus berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas, meskipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 297 KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)**.** Fenomena meningkatnya jumlah korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menunjukkan masih lemahnya implementasi hukum serta kurang optimalnya mekanisme perlindungan dan penegakan sanksi terhadap pelaku. Di sisi lain, sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, perdagangan orang menuntut sistem hukum yang responsif, terpadu, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, menilai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menawarkan rekomendasi dalam rangka memperkuat sistem hukum pidana nasional guna memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan menegakkan keadilan secara komprehensif.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana bentuk dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia". Rumusan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diterapkan dalam praktik, sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku, serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 serta menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penegakannya di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Tujuan dari studi kualitatif deskriptif-analitis ini adalah untuk secara sistematis mendeskripsikan bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab hukum bagi pelaku perdagangan orang di Indonesia. Data, dokumen hukum, temuan wawancara, dan tinjauan pustaka yang relevan menjadi dasar teknik deskriptif ini, yang menjelaskan keadaan dunia nyata seputar penegakan undang-undang dan peraturan anti-perdagangan orang. Selanjutnya, hasil deskripsi tersebut dianalisis secara kualitatif guna memahami bagaimana ketentuan hukum dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) diterapkan dalam praktik penegakan hukum, termasuk hambatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui metode ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku serta sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi korban perdagangan orang.

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Paradigma hukum positivis mendasari metode yuridis normatif. Teori ini menyatakan bahwa supremasi hukum sama dengan seperangkat aturan lain yang dikodifikasi dan dikeluarkan oleh badan-badan yang

berwenang sebelumnya. Menurut teori ini, sistem hukum adalah struktur yang pada dasarnya baik tetapi tertutup dan terisolasi yang tidak berpengaruh pada masyarakat sehari-hari (Somitro, 1998).

Langkah pertama dalam menggunakan metode hukum adalah menentukan undang-undang dan peraturan mana yang berlaku untuk masalah yang sedang dihadapi. Untuk menemukan perspektif baru dan relevan sesuai dengan situasi hukum yang ada, penulis dapat menggunakan metode konseptual, yang mencakup pencarian pandangan dan doktrin yang ada di bidang penelitian hukum. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, para sarjana akan lebih siap untuk mengembangkan argumen hukum yang persuasif yang membahas masalah yang sedang dihadapi (Hapsari *et all*, 2024).

Data sekunder, terutama item yang ditemukan di perpustakaan, sangat diperlukan untuk penelitian ini. Oleh karena itu, literatur, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, merupakan sumber data ini. Penelitian kepustakaan adalah istilah yang umum untuk jenis penelitian ini karena jenis dan sumber data yang digunakan.

a. Sumber Data Penelitian
   Sumber daya penelitian yang digunakan dalam studi ini bersumber dari basis data kepustakaan. Informasi dikumpulkan dari sumber sekunder, yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.
b. Teknik Pengumpul Data
   Studi ini mengandalkan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan datanya, yang meliputi gagasan doktrinal dan teoretis, sudut pandang konseptual, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Buku, artikel ilmiah, undang-undang, dan publikasi akademis lainnya termasuk dalam kategori ini.

Penggunaan metode yuridis normatif relevan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam "KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)". Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah sinkronisasi dan efektivitas penerapan regulasi dalam praktik penegakan hukum. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban hukum, keadilan bagi korban, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari kebijakan pemberantasan perdagangan orang. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana penerapan hukum di Indonesia telah sesuai dengan tujuan perlindungan korban dan penegakan keadilan yang diamanatkan oleh sistem hukum nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perdagangan Orang "Rechtstoepassing" dan "rechtshandhaving" adalah istilah Belanda untuk penegakan hukum, sedangkan "law enforcement" adalah kata dalam bahasa Inggris. Aktivitas penegakan hukum tidak diragukan lagi mencakup individu, sehingga lebih dari sekadar prosedur rasional. Dalam hal ini, orang-orang yang disebutkan terkait dengan fungsi organisasi atau departemen penegakan hukum, yang mencakup personel kepolisian. Individu yang dimaksud di sini adalah para pejabat penegak hukum tersebut. Kepolisian Indonesia, jaksa, pengadilan, dan pejabat pemerintah semuanya memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan melindungi warga negara. Ini menunjukkan betapa rumitnya proses penegakan hukum. Cukup banyak tingkatan yang perlu dijelaskan. Bahkan Satjipto Rahardjo membagi bidang penegakan hukum menjadi dua cabang yang berbeda: umum dan khusus. Istilah

penegakan hukum merujuk pada proses penegakan kewajiban hukum dan pengambilan tindakan disiplin terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan. Pada saat yang sama, definisi penegakan hukum yang ketat menekankan hubungan antara tindakan penegakan hukum dan setiap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum (Silaban, 2023).

Terdapat dua cabang penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam buku "Konsep Penegakan Hukum" karya Dellyana dan Shant (Silaban, 2023). Ditinjau dari subjeknya. Setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan hukum merupakan subjek dalam beberapa hal sepanjang prosedur penegakan hukum. Terlepas dari apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan, subjek hukum ini adalah pihak yang menegakkan standar normatif. Subjek hukum berkewajiban untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh hukum. Akibatnya, fokus dalam penegakan hukum adalah pada upaya yang dilakukan oleh personel penegak hukum untuk memastikan dan mengkonfirmasi implementasi standar hukum yang tepat. Ditinjau dari objeknya. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada sistem hukum, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan sebagaimana yang dipertahankan pada norma-norma yang telah ditetapkan dan konsep-konsep yang lebih abstrak tentang keadilan yang meresap dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, penegakan hukum terutama berkaitan dengan aturan resmi yang tertulis. Dalam hukum pidana positif, sistem pertanggungjawaban pidana saat ini didasarkan pada dua prinsip: konsep legalitas dan prinsip kesalahan. Pelaku harus melakukan suatu tindakan untuk menebus kerusakan yang mereka timbulkan ketika mereka melakukan kejahatan. Karena aturan yang berlaku untuk kejahatan tertentu dan fakta bahwa seseorang mungkin melakukan kesalahan yang merupakan tindakan kriminal, maka pertanggungjawaban pidana pun timbul (Setiawan, 2007).

Roeslan saleh menyatakan bahwa: "Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari suatu aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan pandangan yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat" (Judas *et all*, 2022). Baik tindakan yang disengaja (dolus) maupun kelalaian (culpa), yang keduanya merupakan jenis tujuan, terkait erat dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Tidak mungkin untuk menuntut suatu perbuatan secara pidana, bahkan jika telah terbukti bahwa perbuatan tersebut ilegal, kecuali jika kapasitas untuk bertanggung jawab dan kapasitas untuk berbuat salah terpenuhi. Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, menjadi sulit untuk menilai apakah tindakannya disengaja atau lalai. Demikian pula, ketika seseorang tidak memiliki kapasitas untuk menahan diri, menjadi lebih sulit untuk memahami mengapa pengampunan diperlukan.

Sebagai sumber utama aturan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi positif atau tidak ambigu tentang kapasitas tanggung jawab; sebaliknya, ia menawarkan interpretasi negatif dalam ketentuannya (Endrawati dan Sulistio, 2007). Rumusan Pasal 44 ayat (1) menunjukkan hal ini: "Barangsiapa mengerjaakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum Berdasarkan perumusan pasal diatas kemampuan bertanggungjawab erat hubungannya dengan akal sehat manusia. Seseorang yang akalnya tidak sehat maka hilanglah kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang tersebut, sehingga dalam keadaan yang seperti ini tidak mungkin dijatuhkan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan seseorang tersebut, meskipun dalam kenyataanya perbutan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum". Karena kemampuan untuk membedakan apakah suatu perbuatan

dilakukan dengan sengaja atau lalai yang keduanya merupakan jenis kesalahan, diperlukan untuk pengenaan hukuman pidana, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab akan membuat sanksi tersebut menjadi tidak berarti. Kemampuan untuk bertanggung jawab tidak didefinisikan secara jelas dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam KUHP, meskipun terdapat sejumlah komentar ahli mengenai hal ini dalam berbagai publikasi hukum pidana. Memiliki kapasitas mental untuk bertanggung jawab, menurut pandangan Simon, merupakan syarat yang diperlukan untuk rasionalisasi aktivitas kriminal, baik dari tingkat masyarakat maupun individu. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu (Endrawati dan Sulistio, 2007).

Ia memiliki kemampuan untuk memahami bahwa perilakunya ilegal. Berdasarkan pengetahuan ini, ia dapat memutuskan apa yang diinginkannya. Lebih lanjut Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk (Faradila *et all*, 2023). Menyadari pentingnya dan dampak dari tindakan sendiri; Memahami bahwa masyarakat tidak membenarkan atau menerima perilaku seseorang; Menetapkan kemampuan diri untuk bertindak. Konsep kesalahan sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak di bawah sistem hukum Indonesia untuk tindak pidana perdagangan manusia.

Menurut konsep ini, pelaku harus bersalah dan patut disalahkan agar hukuman dapat dijatuhkan; jika tidak, tidak akan ada hukuman (geen straf zonder schuld). Prinsip ini menjadi penting dalam tindak pidana perdagangan orang karena kejahatan tersebut melibatkan unsur kesengajaan (*dolus*) dalam bentuk eksploitasi yang terencana dan sistematis. Pelaku tidak hanya bertindak secara sadar, tetapi juga memahami bahwa tindakannya melanggar hukum dan merugikan orang lain. Sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana harus dipahami tidak semata-mata dari aspek yuridis, tetapi juga dari perspektif keadilan sebagai nilai filosofis, sehingga pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang bukan hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk memulihkan keseimbangan moral dan sosial yang telah rusak akibat kejahatan tersebut. Lebih jauh, unsur kemampuan bertanggung jawab memiliki dimensi moral dan psikologis yang menentukan sah atau tidaknya penerapan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP**,** seseorang yang tidak memiliki kemampuan berpikir sehat atau mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana, karena hilangnya kesadaran moral dan kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya. Dalam konteks perdagangan orang, hal ini penting untuk membedakan antara pelaku yang benar-benar memiliki niat jahat dengan pihak-pihak yang mungkin hanya menjadi alat atau korban dalam jaringan kejahatan terorganisir. Menurut pandangan Simon dan Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab mensyaratkan kematangan psikis untuk memahami akibat perbuatan, kesadaran akan larangan hukum, serta kemampuan mengendalikan kehendak. Dengan demikian, dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, aspek kemampuan bertanggung jawab harus menjadi dasar analisis yuridis yang ketat agar keadilan substantif tercapai pelaku yang benar-benar bersalah dijatuhi hukuman setimpal, sementara mereka yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan kondisi kejiwaannya.

Prinsip yang mendasari hukum pidana adalah prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum jika tidak diatur oleh undang-undang. Jika perilaku seseorang dapat dianggap sebagai kejahatan menurut definisi hukum, mereka

dapat dikenai hukuman. Artinya, bahkan dalam situasi perdagangan manusia, perlu untuk menetapkan semua aspek tuduhan sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan. Seseorang dianggap terlibat dalam perdagangan manusia jika perilakunya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh hukum (Sari *et all*, 2024). Landasan Hukum Pidana Tindak Perdagangan Orang Melanggar martabat seseorang dengan cara apa pun sama dengan terlibat dalam perdagangan orang, yang merupakan sejenis "modern day slavery". Yang dimaksud dengan "modern day slavery" adalah praktik memanfaatkan individu yang lebih lemah dengan mengambil keuntungan dari kelemahan ekonomi, fisik, dan emosional mereka serta memperlakukan mereka seperti budak (Setiawan, 2017).

Perdagangan orang menggambarkan praktik memperdagangkan manusia. Bagi Indonesia, konsep perdagangan orang masih dalam tahap awal. Sejak Konvensi Menentang Perdagangan Manusia ditandatangani pada tahun 1949, isu perdagangan manusia telah ada. Isu ini semakin mendapat perhatian setelah Platform Aksi Beijing, yang mengarah pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Selanjutnya, UU No. 7 Tahun 1984, yang membahas ratifikasi CEDAW oleh Indonesia, melegitimasi perdagangan manusia. Pada konferensi GAATW tahun 1994 di Thailand, hal ini semakin ditekankan sebagai tujuan penting (Silaban, 2023). Pasal 297 KUHP telah menjadikan perdagangan manusia sebagai tindak pidana di Indonesia sejak negara ini berdiri. Perdagangan manusia telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir global, sehingga diperlukan upaya baru untuk menghentikannya. Hal ini sejalan dengan Keppres No.88 Tahun 2002, yang menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk Mengakhiri Perdagangan Perempuan dan Anak serta membentuk gugus tugas dengan perwakilan dari berbagai sektor untuk melaksanakan rencana tersebut. Perdagangan manusia merupakan prioritas nasional, dan komitmen ini bertujuan untuk melakukan lebih dari sekadar menghentikan kejahatan; tetapi juga berupaya mengatasi akar permasalahannya, yang meliputi hal-hal seperti nilai-nilai sosial budaya, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan (Setiawan, 2017).

UU No21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana yang Melibatkan Perdagangan Orang mengatur perdagangan manusia dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: "Perdagangan orang adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi" (Hapsari *et all*, 2024). Namun, masih ada rintangan rumit yang harus diatasi dalam hal penerapan hukum dan kebijakan dalam upaya mengakhiri perdagangan manusia di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh jaringan pelaku, terutama karena sifat kejahatan ini yang terorganisir dan lintas batas. Selain itu, ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya pendidikan, serta kurangnya akses terhadap lapangan kerja layak menjadi faktor pendorong yang sulit diatasi hanya dengan instrumen hukum semata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus dibarengi dengan strategi preventif yang menyentuh akar masalah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Ayat (1) dan (2) Pasal 2 mencakup hal-hal berikut, yang mengatur secara rinci rumusan kejahatan (bestandelen van heit feit) yang

digunakan ketika seseorang atau perusahaan (melalui orang-orang yang mengendalikan perusahaan) melakukan kejahatan perdagangan orang " (Hapsari *et all*, 2024).

Di wilayah Republik Indonesia, perbuatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang lain dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan karena hutang, atau dengan memberikan pembayaran atau keuntungan bahkan dengan persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk mengeksploitasi mereka, dapat dihukum dengan hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000. Pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman yang sama seperti yang disebutkan dalam ayat (1) jika perbuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap orang lain.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan orang. Perusahaan yang merekrut pekerja melalui informasi dari mulut ke mulut atau melalui jaringan regional terlibat dalam perdagangan manusia ketika mereka membantu pekerja migran memalsukan dokumen identitas mereka, menahan mereka secara ilegal di tempat penampungan, memberi mereka berbagai pekerjaan, atau memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam bisnis seks. Siapa pun, mulai dari orang asing hingga kenalan dekat, keluarga, atau bahkan kepala kota, dapat menjadi agen atau perantara. Penggunaan ketidakjujuran, penipuan, atau pemalsuan dokumen dalam proses perekrutan menjadikan mereka sebagai pelaku perdagangan manusia. Ketika aparat pemerintah memalsukan dokumen, memungkinkan terjadinya pelanggaran, atau membantu penyeberangan perbatasan ilegal, mereka terlibat dalam perdagangan manusia. Ketika majikan memperlakukan pekerja mereka dengan buruk, termasuk tidak membayar gaji, memborgol mereka, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa mereka untuk terus bekerja meskipun berisiko, atau memperbudak mereka dengan hutang, mereka adalah pelaku perdagangan manusia. Menurut KUHP Indonesia, mucikari dan pemilik rumah bordil dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika mereka terlibat dalam praktik-praktik tertentu, seperti perbudakan, perbudakan karena hutang, pengurungan, pembatasan pergerakan, tidak membayar upah, atau perekrutan dan mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.

Ketika anggota keluarga menjual anak atau saudara kandung mereka kepada pengusaha industri seks atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, mereka terlibat dalam perdagangan manusia. Pembayaran untuk upah masa depan anak-anak mereka juga diterima di muka. Dengan cara yang sama, ketika orang tua mendaftarkan anak-anak mereka sebagai agen pembayaran hutang, mereka menjerat anak-anak tersebut dalam perbudakan finansial. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita dengan tujuan khusus untuk menjualnya ke prostitusi, memperbudaknya, atau mengeksploitasinya untuk keuntungan finansialnya sendiri, ia terlibat dalam perdagangan manusia. Jenis-jenis perdagangan manusia Heru Kasidi mengemukakan beberapa unsur perdagangan orang, sebagai berikut: (Hapsari *et all*, 2024).

Unsur Pelaku Setiap orang atau entitas yang melakukan kejahatan perdagangan manusia dianggap sebagai orang berdasarkan UU PTPPO. (Pasal 1 angka 4 UU PTPPO) Unsur Proses Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang semuanya merupakan bagian dari migrasi manusia, yang dapat berupa serangkaian kegiatan organik atau terencana. Unsur Cara Ancaman, kekerasan fisik, penggunaan kekerasan fisik, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan karena hutang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang

yang memegang kendali atas orang lain semuanya merupakan tindakan atau perbuatan khusus yang dilakukan untuk memastikan proses tersebut dapat terlaksana. Unsur Tujuan Apa yang ingin dicapai pelaku melalui keterlibatan dalam perdagangan manusia, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, eksploitasi manusia atau eksploitasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO. Rumusan delik dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya memberikan batasan yang jelas dan komprehensif terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut mencakup pelaku, proses, cara, dan tujuan yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur pelaku yang mencakup orang perseorangan maupun korporasi menunjukkan pengakuan hukum terhadap kompleksitas modus perdagangan orang modern, di mana korporasi atau badan usaha dapat menjadi fasilitator atau pelaku langsung tindak pidana ini. Dengan demikian, rumusan tersebut tidak hanya menegaskan tanggung jawab individu, tetapi juga memperluas jangkauan hukum agar mampu menjerat aktor-aktor korporatif yang berperan dalam rantai eksploitasi manusia. Analisis terhadap unsur proses dan cara memperlihatkan bagaimana hukum pidana menitikberatkan pada tindakan sistematis yang mengarah pada eksploitasi, bukan hanya pada akibat akhir berupa penderitaan korban. Tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan seseorang menjadi bagian integral dari kejahatan ini karena seluruh rangkaian tersebut menunjukkan adanya niat dan perencanaan terstruktur. Sebaliknya, pendekatan yang mencakup kekerasan, ancaman, penipuan, pengamanan kekuasaan, atau perbudakan finansial menunjukkan adanya paksaan dan hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.

Karena korban mungkin dipaksa untuk memberikan persetujuannya di bawah tekanan atau dalam upaya untuk melindungi diri dari bahaya, persetujuan semacam ini tidak dapat dianggap tulus dari sudut pandang moral atau hukum. Dengan demikian, UU PTPPO secara eksplisit berupaya melindungi korban dari segala bentuk eksploitasi yang dibungkus dengan praktik manipulatif dan koersif. Sementara itu, unsur tujuan dalam rumusan delik menegaskan bahwa esensi utama dari tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi**,** baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk lain yang merendahkan martabat manusia. Eksploitasi diposisikan sebagai akibat langsung dari seluruh proses dan cara yang dilakukan oleh pelaku, sehingga keberadaannya menjadi pembeda utama antara tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lain yang serupa. Untuk mencegah pelaku kejahatan dan memastikan korban mendapatkan keadilan, negara telah memberlakukan undang-undang pidana yang cukup keras, termasuk hukuman penjara hingga lima belas tahun dan denda hingga 600 juta rupiah. Namun, efektivitas rumusan delik ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan setiap unsur dengan cermat.

Oleh karena itu, penerapan pasal ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban. Konsekuensi pidana yang mungkin dihadapi oleh para pelaku perdagangan manusia. Berikut adalah contoh sanksi pidana yang mungkin dikenakan Denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah wajib dibayarkan, dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun (berdasarkan Pasal 2-6 UU No. 21 Tahun 2007).

Sepertiga tambahan dari ancaman kriminal dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 2 (2), 3, 4, 5, dan 6. Apabila korban menderita luka parah, kondisi mental berat, penyakit menular lain yang dapat berakibat fatal, kehamilan, atau gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang disebutkan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 (berdasarkan Pasal 7 (1) UU No.21 Tahun 2007).

Hukuman untuk perdagangan manusia yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok terorganisir sama dengan hukuman untuk pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (berdasarkan Pasal 16 UU NO.21 TAHUN 2007). Kejahatan perdagangan manusia dikenai hukuman maksimal 280 juta rupiah dan hukuman minimal 40 juta rupiah bagi mereka yang dengan sengaja memberikan atau memalsukan informasi pada dokumen resmi atau dokumen lainnya untuk mempermudah kejahatan tersebut (berdasarkan Pasal 19 UU NO. 21 TAHUN 2007. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Berikut adalah beberapa faktor paling umum mengapa perdagangan orang terjadi: (Nugroho dan Roesli, 2017).

Faktor kemiskinan Sebagai masalah sosial, kemiskinan di Indonesia terkenal sulit dipecahkan. Sayangnya, masalah ini masih belum memiliki solusi yang jelas. Di Indonesia, kemiskinan telah ada sejak lama. Sebagai salah satu komponen dari berbagai kesulitan yang dihadapi negara ini. Variabel internal yang menyebabkan kesenjangan pendapatan dan pengeluaran, kurangnya pendidikan publik dan pemahaman tentang lingkungan bisnis dan pekerjaan, serta kurangnya prospek pekerjaan, semuanya berkontribusi terhadap kemiskinan. Terdapat korelasi yang kuat antara perdagangan manusia dan kemiskinan. Dengan menawarkan tawaran yang menarik, seperti posisi bergaji tinggi dengan tunjangan penuh, pelaku memanfaatkan motivasi ekonomi korban. Rendahnya Tingkat Dalam kehidupan individu, pendidikan sangat penting. Pendidikan memiliki potensi untuk mendidik orang dan membuka pikiran mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Pendidikan selalu menjadi masalah di Indonesia, tetapi kemiskinan selalu menjadi faktor utama. Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali kesulitan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemiskinan dan kurangnya pendidikan adalah penyebab utama perdagangan manusia, karena keduanya sangat berkorelasi. Dipaksa dengan Kekerasan Salah satu alasan mengapa korban merasa takut adalah karena hal ini. Dampak psikologis dari perlakuan anarkis di depan umum dan keharusan untuk mematuhi perintah pelaku akan berlangsung lama.

Selain faktor dan penyebab mendasar, terdapat beberapa jenis perdagangan manusia. Perdagangan manusia mengambil banyak bentuk kompleks di luar eksploitasi sederhana. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk ini: (Silaban, 2023). Berdasarkan Tujuan Pengiriman Dalam konteks ini, terdapat perbedaan lebih lanjut antara apa yang dikenal sebagai perdagangan manusia lintas batas dan perdagangan manusia internal, dua bentuk perdagangan manusia. Rute normal perdagangan manusia internal di dalam suatu negara adalah dari kota kecil atau desa ke kota metropolitan yang lebih besar. Sebaliknya, perdagangan manusia yang melampaui batas negara dikenal sebagai perdagangan manusia internasional. Kekhawatiran tentang imigrasi berkontribusi pada masalah perdagangan manusia internasional. Berdasarkan Korban yang membedakan jenis perdagangan manusia ini adalah fakta bahwa hal itu melibatkan eksploitasi baik laki-laki maupun anak-anak. Dalam transaksi perdagangan manusia, perempuan digunakan sebagai komoditas, yang dikenal sebagai perdagangan perempuan. Perdagangan manusia, terutama untuk eksploitasi seksual, perbudakan

rumah tangga, dan pernikahan paksa, secara tidak proporsional memengaruhi perempuan.

Dalam konteks yang sama, korban perdagangan manusia termuda adalah yang paling tidak berdaya. Sangat jarang anak-anak digunakan sebagai pengemis sebelum menjadi korban eksploitasi seksual dan pornografi. Korban perdagangan manusia, baik laki-laki maupun anak-anak, secara tidak proporsional menjadi sasaran eksploitasi ekonomi daripada eksploitasi seksual. Kerja paksa atau kerja tanpa upah adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang dibahas di sini, dan jelas bahwa jenis kerja ini melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan Bentuk Eksploitasi Terdapat perbedaan lebih lanjut antara eksploitasi seksual dan non-seksual ketika membahas jenis-jenis perdagangan manusia yang disebutkan di bawah ini. Pernikahan paksa, prostitusi, dan pernikahan perantara semuanya merupakan bentuk eksploitasi seksual. Pertama, kekerasan seksual merupakan komponen yang tak terhindarkan dari prostitusi paksa. Perdagangan manusia sering menargetkan korban yang aktif mencari pekerjaan. Pedagang manusia sering memulai pola perekrutan mereka dengan merekrut.

Prospek pekerjaan bergaji tinggi dengan tunjangan yang besar merupakan daya tarik yang kuat bagi korban perdagangan manusia. Setelah korban terperangkap, mereka dibawa ke lokasi lain dan dijual oleh pedagang. Pekerja seks kemudian dipekerjakan oleh para wanita ini. Sebagai contoh kedua, pertimbangkan praktik umum memaksa anak-anak untuk menikah, yang sering kali bertujuan untuk meningkatkan status sosial orang tua korban atau untuk menjalin hubungan yang lebih dekat antara kedua keluarga. Pernikahan yang diatur adalah jenis pernikahan anak yang paling umum di Indonesia. Perempuan sering menikahi pria kaya yang lebih tua, sedangkan anak-anak biasanya menikahi orang yang jauh lebih muda.

Di Indonesia, pernikahan paksa bukanlah hal yang jarang terjadi. Bahkan, sejarah dipenuhi dengan contoh-contoh pernikahan paksa. Ketiga, perdagangan perempuan dan anak internasional terjadi melalui kawin perantara. Pembeli, perantara, dan penjual (keluarga) adalah tiga pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dalam tren pengantin pesanan pos ini, para perantara memasang iklan di internet untuk menghubungkan calon pengantin wanita dan pria. Proses negosiasi harga baru dimulai setelah kontak terjalin. Merupakan praktik umum untuk menikahi pengantin wanita di kota asal pembeli setelah kesepakatan tercapai. Biasanya, calon pelanggan berada di luar Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan, jelas bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan dengan dimensi kemanusiaan, karena melibatkan eksploitasi individu yang rentan. Pelanggaran hak asasi manusia, seperti ancaman atau upaya kekerasan, tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia termasuk di antara pelanggaran martabat manusia yang paling serius.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks karena melibatkan jaringan terorganisir, lintas wilayah bahkan lintas negara, serta berdampak luas terhadap harkat dan martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum di tingkat nasional, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan cita-cita kemanusiaan dasar. Dalam sistem hukum Indonesia, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku telah diatur secara tegas dalam Pasal 297

KUHP dan lebih rinci lagi dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk menindak para pelaku, baik individu maupun korporasi, yang terlibat dalam praktik perdagangan orang. UU PTPPO secara komprehensif mengatur unsur pelaku, proses, cara, dan tujuan yang menjadi ciri khas dari tindak pidana ini, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 600 juta rupiah. Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini tetap berpijak pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia memiliki kemampuan bertanggung jawab serta melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kealpaan. Dalam kasus perdagangan orang, unsur kesengajaan biasanya terlihat jelas karena kejahatan ini dilakukan secara terencana, sistematis, dan dengan tujuan eksploitasi.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam menerapkan undang-undang terhadap pelaku perdagangan orang di Indonesia. Tantangan yang paling menonjol adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya kapasitas aparat dalam membuktikan unsur eksploitasi, serta masih adanya keterlibatan oknum aparat dan pihak tertentu dalam jaringan perdagangan orang. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena faktor ketakutan, tekanan ekonomi, maupun ketidaktahuan terhadap hak-haknya. Ketimpangan sosial, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan lapangan kerja juga menjadi akar masalah yang terus memicu terjadinya praktik perdagangan orang. Memberantas kejahatan ini membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup unsur sosial, ekonomi, dan budaya, bukan hanya bergantung pada tindakan peradilan. Dari sisi penegakan hukum, penting bagi negara untuk memperkuat mekanisme koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan saksi/korban agar proses hukum berjalan efektif dan berkeadilan. Pada setiap tahapan proses peradilan pidana, pemerintah harus memprioritaskan rehabilitasi korban bersamaan dengan penghukuman pelaku. Korban juga membutuhkan ganti rugi dan kompensasi yang layak di samping perlindungan hukum yang mencakup komponen psikologis, sosial, dan ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Endrawati, Lucky, and Faizin Sulistio, 'Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang', 2007

Faradila, Ainuddin, and Abdul Gani Makhrup, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 367/PID.SUS/2022/PN.MKS', *Unizar Recht Journal*, 2.1 (2023)

Hapsari, Tasa Titi, Rahmatul Hidayati, and Budi Parmono, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia', *DINAMIKA*, 30.1 (2024), pp. 9458–74

Hidayat, Sukma, Kurnia Abadi, and Ana Rahmatyar, 'Pertanggungjawaban Perdagangan Orang Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Corporate Criminal Liability in Person Trafficking Crimes', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.6 (2024), pp. 1976–84, doi:10.56338/jks.v7i6.5412

Judas, Marcelino Andrew, Rodrigo F Elias, and Boby Pinasang, 'Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang', 2022

Nugroho, Bastianto, and M. Roesli, 'Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking', *Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1*, 2017

Nugroho, Okky Chahyo, 'Tanggung Jawab Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)', *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, 18.30 (2018), pp. 543–60

Sari, Devy Novia, Sunardi, and Afandi, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pdana HumanTrafficking Oleh Korporasi', *Dinamika*, 30.2 (2024)

Setiawan, Ferry, 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Diatur Dalam Pasal 297 KUHP , Akan Tetapi Karena Perdag', *Deliberatif*, 1.1 (2017), pp. 150–66

Silaban, Lidya Chabelita, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan ORang Di Kepolisian Daerah Riau' (Universitas Islam Riau, 2023)

Somitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Gia Indonesia, 1998)

Utami, Sekar Nursyahidah, and N Nasrudin, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang (Hukum Traffickhing) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman', *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2024), pp. 1–9, doi:10.15575/qanuniya.v1i1.816